

**PRINSIP KEMUDAHAN DALAM SISTEM PERIZINAN BANGUNAN
GEDUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2023 TENTANG CIPTA KERJA**

Meria Agustina
Hukum/Magister Ilmu Hukum
Dr. Sonya Claudia Siwu S.H.,M.H.,LL.M

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis prinsip kemudahan pada sistem PBG yang mengacu pada Pasal 24 UU Cipta Kerja dan model regulasi PBG yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan pembahasan diperoleh kesimpulan: *Pertama*, sistem PBG saat ini terdapat beberapa tahapan-tahapan dalam procedural permohonannya . PBG menggunakan konsep pendekatan berbasis risiko (*base risk approach*) yang dilakukan dengan menetapkan klasifikasi jenis bangunan sesuai tingkat risikonya, serta pelibatan tenaga profesi ahli, yang dimana ini tidak memberikan kemudahan bagi pelaku usaha karena tidak efisien dalam jangka waktu yang harus ditempuh dalam setiap prosesnya.*Kedua*, penggunaan metode pendekatan berbasis risiko diperlukan pelibatan tenaga profesi ahli. Hal itu merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab dari pemerintah sebagai pemberi izin kepada tenaga profesi ahli. Pada konsep IMB dipungut retribusi dengan alasan pemberi izin memberikan imbalan jasa berupa inspeksi dan gambar teknis. Sedangkan pada PBG, pemberi izin sudah tidak lagi memberikan imbalan jasa, karena telah diserahkan kepada tenaga profesi ahli. Oleh karenanya seharusnya pemberian PBG tidak tepat dipungut retribusi lagi, karena pelaku usaha harus mengeluarkan biaya konsultasi kepada tenaga profesi ahli.

Kata Kunci: Kemudahan, Sistem, Gedung

**PRINCIPLES OF CONVENIENCE IN THE BUILDING LICENSE
SYSTEM BASED ON LAW NUMBER 6 OF 2023 CONCERNING
WORK CREATION**

Meria Agustina
Law/Master of Law
Dr. Sonya Claudia Siwu S.H.,M.H.,LL.M

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine and analyze the principle of convenience in the PBG system which refers to Article 24 of the job creation law and the model of PBG regulations that can provide convenience for business actors. Based on the de discussion, the following conclusions can be drawn: First, the PBG system currently has several stages in the procedural application. PBG uses the concept of a risk-based approach which is carried out by determining the classification of building types according to the level of risk , as well as the involvement of professional expert, which does not make it easy for business actors because it is not efficient in the time period that must be taken in each process. Second, the use of a risk-based approach method requires the involvement of professionals. This is a form of transfer of responsibility from the government as a permit provider to expert professional staff. In the IMB concept, a levyb is levied on the grounds that the licensor provides compensation for services in the form of inspection and the technical drawings. Where as in PBG, the licencor no longer provides compensation for service, because it has been handed over to professional staff. Therefore, PBG Should not be properly levied anymore, because business actors have to pay consulting fees to professionals.

Keywords: *convenience, system, building*